



MEMBINANG PETA KOALISI PARPOL JELANG PILPRES 2024

SEJAK presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk pertama kali dalam pemilihan umum 2004, atau yang kemudian populer dengan singkatan Pilpres, maka ada tiga hal utama yang menjadi fokus perbincangan publik.

Ketiga hal utama tersebut adalah; pertama, bagaimana pergerakan partai politik atau gabungan partai politik (parpol) yang akan mengukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), karena Pilpres tidak membuka pencalonan dari jalur perseorangan atau independen seperti dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kedua, perihal ketentuan presidential threshold yang terakhir diatur pada

hui, dalam draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024, pendaftaran pasangan capres-cawapres akan dibuka pada 7-13 September 2023. Kemudian KPU akan menetapkan capres-cawapres, calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang memenuhi syarat pada 11 Oktober 2023.

Efeknya, pergerakan parpol, sebagai lokomotif pencalonan, dan sosialisasi figur capres-cawapres untuk menguatkan konteks popularitas dan elektabilitas, juga semakin masif dan intensif. Lembaga survei pun merespon kondisi ini dengan secara periodik melakukan survei dan merilis hasilnya secara terbuka kepada publik.

Sebagai contoh, hasil survei terkini yang dilakukan oleh Indikator Politik



Oleh: Dr. Hendra Alfani
(Dosen FISIP Universitas Baturaja dan
Direktur Lingkar Prakarsa Institute)

pilihan itu tentu juga bergantung pada "nilai jual" figur capres-cawapres yang akan diusung.

Partai Golkar, PAN dan PPP, sudah mulai memanaskan peta politik dengan menggalang poros pertama koalisi yang diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Poros KIB jika di total memiliki 23,67% suara sah dengan total 148 perolehan kursi di DPR atau sama dengan 25,73% telah melebihi presidential threshold. Namun, KIB belum memunculkan siapa figur capres-cawapres yang akan diusung. Lalu muncul keraguan publik; apakah poros KIB akan permanen sampai pendaftaran capres-cawapres?

Selanjutnya, pada 1 Juni 2022, terjadi pertemuan antara Prabowo Subianto (Ketum Gerindra) dengan Surya Paloh

sebelumnya (2014 dan 2019), yang residunya masih terasa hingga kini.

Lalu bagaimana nanti keputusan akhir PDIP? Percaya diri maju sendiri, atukah akan membuka diri berkolaborasi dengan poros KIB yang sudah terbentuk? Mungkin jugalah bergabung dengan poros pertemuan "Gondangdia" yang dirintis oleh Gerindra-Nasdem? Tetapi bisa juga bakal bergandengan dengan poros koalisi baru, yang kata Cak Imin (Muahimin Iskandar, Ketum PKB) sedang digagas oleh PKB.

Memang, sejauh ini dinamika politik masih sangat cair. Semua kemungkinan politik masih bisa terjadi. Sebab, belum dapat dipastikan tingkat "kemungkinan" koalisi dan wacana poros koalisi baru yang akan dibentuk. Termasuk poros koalisi KIB, juga diyakini banyak



Prabowo



Anies Baswedan



Ganjar Pranowo



Ridwan Kamil



Agus Hari Murty
Yudhoyono



Sandiagio Uno



Khofifah Indar
Parawansa



Tri Rismaharini



Puan Maharani

pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana ketentuan tentang ambang batas itu mulai diberlakukan pada Pilpres 2019. Dan sepertinya tetap akan diberlakukan dalam Pilpres 2024 mendatang.

Pasal 222 UU No. 7/2017 itu menyebutkan bahwa; "pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya."

Ketiga, setiap jelang gelaran Pilpres, maka siapa figur atau tokoh (utamanya figur/tokoh capres) yang akan digadang menjadi capres-cawapres, pasti menyedot perhatian dan perbincangan publik. Dan tentu saja, topik perbincangan itu biasanya dimulai dengan rilis hasil survei dari berbagai lembaga survei yang fokus pada konteks popularitas dan elektabilitas sosok capres yang dimunculkan ke publik.

Secara eskalatif, ketiga hal itu makin "riuh" diperbincangkan mengingat waktu pendaftaran capres-cawapres semakin dekat. Sebab, seperti diketa-

Indonesia pada 14-19 April 2022, yang dilaksanakan secara semiterbuka dengan mensimulasi 19 nama capres, menghasilkan nama-nama yang masuk sepuluh besar secara berurutan sebagai berikut; Ganjar Pranowo: 26,7%, Prabowo Subianto: 23,9%, Anies Baswedan: 19,4%, Ridwan Kamil: 3,5%, Agus Harimurti Yudhoyono: 3,2%, Sandiagio Salahuddin Uno: 2,4%.; 2,4%, Khofifah Indar Parawansa: 1,9%, Tri Rismaharini: 1,3%, dan Puan Maharani: 1,1%.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia itu, dan survei dari beberapa lembaga survei lainnya relatif sama hasilnya. Yaitu, sama-sama menempatkan tiga nama di posisi puncak secara bergantian di posisi yang relatif stabil pada konteks popularitas dan elektabilitas. Tiga nama tersebut adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Tentu, konstelasi pergerakan politik ketiga figur capres teratas itu, berkelindan dengan posisi sembilan parpol yang berhasil melebihi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam perolehan suara sah dan jumlah kursi di DPR secara signifikan pada pemilu 2019.

Kesembilan parpol tersebut, secara berurutan perolehan suara sah dan jumlah kursinya di DPR, adalah: PDIP

27.053.961 (19,33%), 128 kursi; Partai Gerindra 17.594.839 (12,57%), 75 kursi; Partai Golkar 17.229.789, (12,31%), 85 kursi; PKB 13.570.097 (9,69%), 58 kursi; Partai Nasdem 12.661.798 (9,05%), 59 kursi; PKS 11.493.663 (8,21%), 50 kursi; Partai Demokrat 10.876.057 (7,77%), 54 kursi; PAN 9.572.623 (6,84%), 44 kursi, dan; PPP 6.323.147 (4,52%) mendapat 19 kursi.

Dari data tersebut, berdasarkan perhitungan, jika mengacu kepada pasal 222 UU No. 7/2017, maka hanya PDIP yang dapat mengukung capres-cawapres sendiri dalam Pilpres 2024, karena PDIP memperoleh 19,33% suara sah dan berhak mendapat 128 kursi (22,26%) di DPR dari total 575 jumlah kursi di DPR. Sementara kedelapan parpol lainnya harus berkoalisi untuk bisa mengukung capres-cawapresnya.

Pada konteks koalisi inilah peta politik dalam Pilpres 2024, menjadi kerja politik maraton bagi kedelapan parpol untuk mendaftarkan capres-cawapres yang akan diusungnya pada 7-13 September 2023. Sedangkan PDIP, sebagai pemenang pemilu 2019, dalam posisi menunggu, sambil mengamati dan terus melakukan kerja-kerja politik untuk memutuskan apakah fokus maju sendiri atau menimbang parpol mana gerangan yang akan diajak koalisi. Dan

(Ketum NasDem) di Kantor DPP NasDem, Gondangdia. Pertemuan itu diduga mengambil ancap-ancang untuk membentuk poros koalisi berikutnya. Pertemuan "Gondangdia" itu diyakini banyak pihak sebagai awal koalisi Gerindra-NasDem dalam Pilpres 2024.

Jika poros koalisi ini terbentuk, juga memenuhi syarat presidential threshold, yaitu dengan total 21,62% perolehan suara sah dan total 134 kursi di DPR atau sama dengan 23,30%. Prediksinya akan mengukung pasangan Prabowo-Anies. Tapi konteks politiknya masih sangat dinamis. Sebab, NasDem baru mengumumkan nama capres yang akan diusung pada Rakernas NasDem yang akan digelar pada 16 Juni 2022.

Lalu bagaimana dengan tiga parpol yang "tersisa" yaitu PKB, PKS dan Demokrat? Jika ketiga parpol ini menjadi poros koalisi ketiga, syarat presidential threshold-nya juga terpenuhi, bahkan paling tinggi. Sebab jika ditotal perolehan suara sah ketiga parpol ini berjumlah 25,67%, dengan total perolehan 162 kursi di DPR atau sama dengan 28,17%.

Jika poros koalisi ini terbentuk, maka peta koalisi pengusung capres-cawapres 2024 akan semakin marak dengan nuansa politik yang lebih demokratis. Tidak lagi akan terjadi pembelahan akut seperti pada dua edisi Pilpres

pihak belum permanen. Semua masih bisa berubah. Paling tidak sampai batas akhir pendaftaran capres-cawapres pada 13 September 2023.

Namun, paling tidak, terbentuknya poros koalisi KIB, pertemuan "Gondangdia" atau wacana poros koalisi baru yang akan digagas PKB - sambil menunggu sikap akhir PDIP - sebagai pemenang pemilu 2019, adalah pertanda baik bagi penguatan konsolidasi demokrasi Indonesia dalam konteks Pilpres 2024. Sehingga tidak lagi terjadi polarisasi pilihan politik yang dapat mengancam keutuhan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Semoga! Kita tunggu saja. Tabik. (*)

PEMBACA yang Budiman, silakan kirim artikel Anda ke email : redaksi.palpos2017@gmail.com. Syaratnya cukup lampirkan fotokopi kartu identitas dan panjang tulisan minimal 1.200 kata. (redaksi)